



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

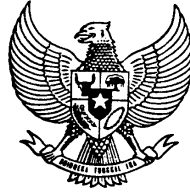
**PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD,
DAN DPD 2019 PROVINSI DKI JAKARTA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi DKI Jakarta

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
(Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Ahmad Iman
(Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Golongan Karya
(Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Beringin Karya
(Pemohon Perkara Nomor 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
6. Partai Demokrat
(Pemohon Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 14.10 – 15.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Anwar Usman
- 2) Arief Hidayat
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Rio Tri Juli Putranto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Taufik Basari
2. Andana Marpaung
3. Sona Sofyan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ali Lubis
2. Ahmad Fatoni
3. Dwi Putri Cahyawati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Radian Syam
2. M. Syifa Qolbi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Heru Widodo
2. Derek Lopatty
3. Aan Sukirman

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Muhajir
2. Pangihutan B. Haloho
3. Dimaz Elroy

F. Termohon:

1. Muhaimin
2. Nurdin

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Absar Katabrata
2. Liani
3. Arif Effendi

4. Partahi Gabe
5. Sutejo
6. Tri Sandhi Wibisono

H. Bawaslu:

1. Abhan
2. Fuadi
3. Jufri
4. Witra
5. Mahyudin

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Jou Hasyim Waimahing
2. Rahman
3. Utomo Karim
4. Mehbob
5. Joko F. Prabowo

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Surya Imam Wahyudi
2. Slamet Arifin
3. Eric Branado

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Rheza Perdana
2. Surya Imam Wahyudi
3. Raden Yusuf Kusuma Anjar Bawono
4. Ruslan Abdul Gani M.
5. Sutejo Sapto Jalu

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu.

Ya, sidang termin kedua pada hari kedua ini adalah untuk memeriksa Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem Pemohonnya, Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya Partai Gerindra, Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya PKB, Perkara 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya Partai Golkar, 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya Partai Berkarya, dan Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pemohonnya dari Partai Demokrat.

Silakan, untuk Pemohon Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem. Hadir saya sendiri Taufik Basari. Di sebelah kanan saya, Andana Marpaung, Kuasa Hukum. Kemudian ada pendamping, Sona Sofyan. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALI LUBIS (GERINDRA)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Ali Lubis dari Partai Gerindra. Hari ini hadir bersama rekan saya, Ahmad Fatoni, S.H. dan Mba Dwi Putri. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dari PKB.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir, saya atas nama ... dari PKB, Radian Syam. Sebelah kiri saya, pendamping Mas Qolbi. Kemudian ada satu lagi mungkin lagi menyusul ke atas, Pak Mahmudin. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut ke Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU WIDODO (GOLKAR)

Assalamualaikum wr. wb.

100 ... Perkara 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir kuasanya, Yang Mulia, saya Heru Widodo, kemudian bersama Aan Sukirman, dan Derek Lopatty.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya? Tidak ada, ya?

Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Pemohon Demokrat, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO (DEMOKRAT)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kami Kuasa dari Partai Demokrat, Nama saya, Pangihutan B. Haloho. Di sebelah kiri saya, Dimaz Elroy. Dan di sebelah kanan saya, Muhajir.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian dari Termohon, silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami Kuasa Termohon KPU RI, Yang Mulia. Saya Absar Kartabrata dengan rekan saya, Liani paling belakang. Kami dari Kantor Hukum Absar Kartabrata dan Rekan. Kami mewa ... untuk menghadapi gugatan Gerindra. Kemudian rekan kami Arif Efendi dan Partahi dari Kantor Hukum ANP untuk Partai Berkarya dan Partai Golkar. Kemudian Rekan Advokat Sutejo di belakang kami dan Tri Sandhi Wibisono dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office, untuk Partai Demokrat dan Nasdem.

Selain itu, hadir juga, Yang Mulia, pada hari ini adalah Komisioner dari KPU DKI, Muhaimin di belakang kami dan Nurdin.

Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari Bawaslu, silakan.

14. BAWASLU: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Bawaslu hadir pada sidang hari ini dari Bawaslu DKI. Di sebelah kanan saya, Fuadi. Sebelah kiri, Mas Jufri. Kemudian di belakang, ada Mahyudin, dan Kasubag Witra, dan saya sendiri Abhan. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu ada dua. Satu, Demokrat, silakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Partai Persatuan Pembangunan, Pihak Terkait yang hadir saya sendiri Jou Hasyim Waimahing. Sebelah kanan saya, Pak Rahman. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM (DEMOKRAT)

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pihak Terkait dari Partai Demokrat untuk Nomor Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir saya Utomo Karim. Sebelah saya, rekan saya, Mehbob. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian Pihak Terkait 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem, ya? Silakan, Pihak Terkait.

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR PERKARA 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ERIC BRANADO (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.

Mewa ... untuk perkara sebagai Pihak Terkait dari Partai Nasdem, saya sendiri Eric Branado, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Pihak Terkait Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tidak ada, ya? Ya, baik.

Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait PAN dan Gerindra. PAN dulu, silakan.

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI (PAN)

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari DPP PAN, dalam hal ini menjadi Pihak Terkait untuk Perkara yang diajukan oleh Pemohon Partai Gerindra dengan Nomor Permohonan 1 ... Register 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam hal ini diwakili oleh saya, Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H. dan rekan saya, Slamet Arifin.

Kemudian untuk Pihak Terkait atas Permohonan dari Partai Golkar dengan Register 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, diwakili oleh rekan saya, Raden Yusuf Kusuma Anjar Bawono, S.H., M.H. dan rekan saya, Ruslan Abdul Gani M., S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, untuk Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, ya? Ya, tadi saya sudah ini ... ya, baik. Ini surat permohonannya sudah diajukan, ya?

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI (PAN)

Izin? Sudah masuk di Kepaniteraan, di bawah, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI (PAN)

Terima kasih.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Yang Mulia? Dari PPP, surat permohonan sebagai Pihak Terkait, bisa kami serahkan sekarang, Yang Mulia? Soalnya tadi pukul 11.00 WIB, tadi kami serahkan, dari petugas di bawah suruh serahkan di depan persidangan.

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan. Ya, nanti akan disampaikan ke RPH nanti.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Sama Surat Kuasa juga, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Silakan!

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

4 rangkap, ya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, baru diajukan sekarang, ya? Surat permohonannya?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Tadi pukul 11.00 WIB kita sudah ajukan (...)

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Tapi diminta diserahkan di persidangan.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat? Tidak ada, ya? Ya, baik, tidak ada.

Perkara Nomor 214-07-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Pihak Terkaitnya juga tidak ada, ya? Karena Partai Berkarya juga tidak ada. Baik.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Yang Mulia? Perkara Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait Gerindra.

37. KETUA: ANWAR USMAN

174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Ya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Ya. Saya diwakili dengan saya, Rheza Perdana.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, tadi kan sudah disampaikan, tadi kan sekaligus tadi sama 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Itu PAN, Pak.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ha?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

PAN.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, PAN yang 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga tadi?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Ya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Surat permohonannya sudah? Sudah maju?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Sudah, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Samping saya, Sutejo Sapto Jalu.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Berdua, ya?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Ya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RHEZA PERDANA (DEMOKRAT)

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Mohon izin, Yang Mulia? Dari PKS untuk Nomor Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar. Oh, Pihak Terkait? 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? PKS?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Surat permohonannya sudah diajukan?

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Sudah masuk.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Kapan? Sudah lama, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Sudah lama.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah. Nanti dicek. Baik.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOKO F. PRABOWO (PKS)

Baik.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya klarifikasi sebentar, ya.
Mohon izin, Pak Ketua.

Jadi, ini terkait dengan Surat Permohonan menjadi Pihak Terkait. Ini kan ketentuannya bukan dari kuasa hukum yang mengajukan, tetapi sesuai dengan PMK, ini permohonan ini harus dibuat oleh dewan pimpinan pusat ... pimpinan partai, yaitu di ... di dalam ketentuan PMK adalah ketua umum dan sekretaris jenderal, atau nama yang sejenis dengan itu, atau sebutan lain yang ... yang setara dengan ketua umum atau sekretaris jenderal.

Jadi, ini saya sudah baca juga tadi yang dari PPP, ini kan kuasa hukum yang menyampaikan. Jadi, tolong diperhatikan karena ini ada 2 hal di dalamnya, yaitu pengajuan sebagai Pihak Terkait itu adalah harus diajukan permohonannya yang ditandatangani oleh ketua umum, sekretaris jenderal dan disertai dengan keterangan Pihak Terkaitnya. Ya?

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Kita mulai dengan Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Ya, silakan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Perkara Nomor 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang Permohonannya diajukan oleh Partai Nasdem. Pihak Terkaitnya, Demokrat, PPP, dan PKS, ya di situ? Tapi nanti masalah keabsahan sebagai Pihak Terkait nanti akan dipertimbangkan dan nilai ... dinilai oleh Mahkamah karena akan dilihat secara formal sudah memenuhi syarat atau belum.

Baik. Pak Taufik, kita mulai, ya? Pak Taufik mengajukan ini ... Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 23?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pukul 22.57 WIB, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian ada perbaikan tertanggal 31 Mei 2019, pada pukul 02.11 WIB?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berarti ada yang kita pakai sekarang perbaikannya, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti permohonan awal dianggap tidak berlaku, yang dipakai adalah perbaikan permohonan. Ini untuk Pihak Termohon dan Pihak Terkait.

Untuk Kewenangan Mahkamah. Karena ... saya tuntun saja, ya, Pak Taufik?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Biar cepat.

Untuk kewenangan Mahkamah, Saudara mempersoalkan ... Keputusan KPU Nomor 987, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, Saudara mempunyai ... apa ... MK mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi objeknya adalah SK 987.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya. Yang Mulia?

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sebelum berlanjut sedikit, kami ingin menyampaikan bahwa kami mencabut untuk yang Dapil Jakarta (...)

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, nanti dulu. Kalau sudah itu nanti baru ... kalau sudah klir baru kita masuk ke dapilnya, baru itu disampaikan, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian untuk kedudukan, Saudara mempunyai ... Pemohon mempunyai kedudukan karena itu diajukan dan ditandatangani oleh ketua Umum dan sekjen, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya, benar.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian tenggang waktu tadi sudah saya sampaikan, Saudara mengajukan 2 kali permohonan. Yang satu permohonan awal memenuhi tenggang waktu, sehingga sebetulnya permohonan ini sampai ke perbaikannya masih memenuhi tenggang waktu.

Oleh karena itu, masalah tenggang waktu enggak ada masalah, memenuhi tenggang waktu.

Nah, sekarang masuk ke Posita, Pokok Permohonannya, silakan apa yang akan disampaikan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Namun sebelum itu, kami ingin menyampaikan pencabutan untuk perkara yang Dapil DPRD DKI VI. Jadi permohonan ini ada 2, untuk DPR RI Dapil DKI II dan DPRD DKI VI. Khusus untuk yang DPRD DKI VI kami cabut, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Nanti suratnya menyusul.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini sudah dinyatakan dalam persidangan (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Surat menyusul, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi untuk ... ada 2, yang satu masih tetap, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang satu tetap DPR (...)

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk DPR RI?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

DPR RI Dapil DKI II.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DKI II?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik.

102. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang jadi hanya tinggal 1 ini, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan!

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan Permohonan untuk Dapil DPR RI DKI II, yang pada intisarinya sebelum kami masuk ke pokok-pokok permohonan, intisarinya yang menjadi keberatan kami adalah hilangnya hak konstitusional para pemilih yang telah memberikan suaranya.

Yang kedua, kerugian dari suara Pemohon yang hilang akibat rekomendasi Bawaslu RI yang cacat hukum menurut kami, yang didasarkan ala ... atas tafsir yang keliru dari batas waktu surat suara yang harusnya disampaikan, yaitu apakah dihitung berdasarkan stempel Pos atau dihitung berdasarkan secara fisik diterima oleh PPLN di luar negeri di Malaysia.

106. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, Yang Mulia, kami akan mulai pokok-pokoknya.

108. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang pertama, terdapat selisih antara perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan surat ... dengan perolehan suara

yang benar menurut Pemohon, dimana di dalam tabel 5 dan tabel 6 terdapat selisih yang seharusnya suara Partai Nasdem 161.745, tapi ditetapkan oleh Termohon 126.439.

Sementara juga terdapat selisih suara sah yang seharusnya 266 ... sori maaf, seharusnya 2.666.492, tapi ditetapkan oleh Termohon hanya 2.622.791. Selain dari Partai Nasdem, selisih ini juga dialami oleh partai-partai lain-lain ... lainnya, mulai dari PKB sampai dengan PKPI.

Yang Mulia, kenapa terdapat selisih seperti ini? Kami mulai di halaman 7. Karena terdapat 2 Formulir Model DA-1, yaitu Formulir DA-1 yang awal yang ditetapkan oleh PPLN Luar Negeri Kuala Lumpur, dengan yang ditetapkan Formulir DA1-DPR RI Luar Negeri Kuala Lumpur pada saat Pleno KPU RI, atas rekomendasi Bawaslu RI.

Adanya 2 versi Formulir DA-1 ini, mengakibatkan adanya 62.278 surat suara yang tadinya sah, kemudian dinyatakan tidak sah. Kenapa ini bisa terjadi, Yang Mulia? Kami akan sampaikan secara kronologi.

Jadi dimulai dari ... pada tanggal 16 April 2019, KPU RI atau Termohon melaksana ... diminta melaksanakan pemungutan suara ulang di negara Malaysia. Kemudian atas permintaan dari rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut, maka KPU RI mengeluarkan SK Nomor 70 ... 721 dan menyampaikan secara resmi bahwa pemungutan suara ulang akan dilakukan untuk sebanyak 257.121 surat suara dengan metode Pos di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur.

Selanjutnya, Yang Mulia. Tahapan-tahapan PSU ini kemudian berlangsung. Terkait dengan pelaksanaan dari PSU ini, terjadi ada sedikit perubahan mengenai jadwal pengiriman surat suara. Ini ada di poin 4.5, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Halaman 8. Yang tadinya dijadwalkan pada tanggal 29 April 2019, 3 Mei 2019, 6 Mei 2019, tetapi karena tidak cukup waktu untuk proses pelaksanaannya, maka tahapan pengiriman surat suara dilaksanakan pada tanggal 7 Mei, 8 Mei, dan 9 Mei. Sehingga tahap pengiriman suara ... surat suara ke pemilih melalui jasa Pos Malaysia Berhad menjadi sebanyak 6 kali.

Karena adanya perpanjangan dari pelaksanaan pengiriman surat suara ini, maka atas inisiasi dari Pimpinan Partai Demokrat di Malaysia, dimintakan untuk dilakukan juga pemunduran atau perpanjangan batas akhir, penerimaan surat suara untuk di wilayah kerja PPLN Kuala

Lumpur, yang awalnya pada tanggal 13 ... 13 Mei 2019, diperpanjang menjadi tanggal 15 Mei 2019, dan perhitungan yang awalnya tanggal 15 ... 15 Mei 2019, diundur menjadi tanggal 16 Mei 2019.

112. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Atas adanya permintaan tersebut, kemudian KPU ... maaf, PPLN Kuala Lumpur berkonsultasi dengan KPU RI dan akhirnya disetujui, lalu keluarlah Surat KPU Nomor 819 dan seterusnya, tertanggal 13 Mei. Yang pada intinya menyatakan surat suara di wilayah PPLN Kuala Lumpur yang dikembalikan pemilih kepada PPLN Kuala Lumpur akan dihitung secara sah apabila dikembalikan oleh pemilih, selambatnya tanggal 15 Mei 2019.

Selanjutnya, Yang Mulia, proses pelaksanaan PSU ini kemudian berlangsung. Dari surat suara yang kemudian dikirim oleh pemilih kepada PPLN di Kuala Lumpur, terdapat beberapa tahapan. Ada di tabel 3, halaman 9, dan halaman 10.

Untuk yang tahap pertama, diterima secara fisik tanggal 9 Mei 2019, sebanyak 293 surat suara yang berstempel Pos 8 Mei 2019. Kemudian yang kedua, diterima oleh PPLN 10 Mei 2019, dengan ... sejumlah 530 surat suara berstempel P ... berstempel Pos 9 Mei 2019.

Yang ketiga, diterima 14 Mei 2019, sebanyak 1.244 surat suara, dengan stempel Pos 10 Mei dan 13 Mei 2019.

Selanjutnya, yang ke empat, di terima secara fisik tanggal 15 Mei 2019, sebanyak 20.740 surat suara, dengan stempel Pos 10 Mei 2019, 13 Mei 2019, dan 14 Mei 2019.

Yang kelima, diterima secara fisik tanggal 16 Tahun 2019, sebanyak 62.278 surat suara, dengan stempel Pos 15 Mei 2019.

114. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang terakhir, ya?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya, betul, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Secara fisik diterima 16, tapi stempel Posnya 15 Mei?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

15 Mei.

118. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sehingga secara total surat suara yang diterima PPLN Kuala Lumpur adalah 85.085 surat suara.

Kemudian, Yang Mulia. Terdapat surat dari Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, perihal imbauan pada tanggal 15 Mei 2019, yang menyatakan bahwa ... maaf, yang mengimbau agar surat suara hasil PSU yang dihitung adalah surat suara yang di terima melalui Pos Malaysia hanya sampai dengan tanggal 15 Mei 2019, yakni sejumlah 22.087 surat suara.

Selanjutnya, Yang Mulia. PPLN Kuala Lumpur melaksanakan penghitungan suara. Ketika perhitungan suara berlangsung, PPLN Kuala Lumpur memutuskan tetap menghitung surat suara yang masuk berdasarkan batas waktu stempel penerimaan Pos. Dengan merujuk pada Surat KPU Nomor 819, tertanggal 13 Mei 2019. Maaf ini direnvoy sedikit, Yang Mulia, seharusnya 13 Mei tertulis 12 Mei.

120. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sesuai dengan bukti P-4, Yang Mulia. Setelah itu, Yang Mulia, penghitungan suara berlangsung hingga tanggal 17 Mei 2019, pukul 12.00, sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

Namun, dari 85.085 surat suara, PPLN Kuala Lumpur hanya dapat menyelesaikan perhitungan untuk 67.315 surat suara, sehingga terdapat juga 17.770 surat suara yang tidak dilakukan penghitungan karena terkena batas waktu perhitungan.

Setelah perhitungan ini dilakukan, kemudian PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 18 Mei 2019, membacakan hasil perhitungan atau perolehan suara atas seluruh suara yang dikirim melalui Pos dan dihadiri oleh 12 saksi partai politik.

Terhadap hasil perhitungan tersebut, kemudian PPLN Kuala Lumpur menuangkannya di dalam Formulir DA1-DPR LN Kuala Lumpur, sebagaimana dalam Bukti P-1 ... P-1 Nasdem Jakarta II RI, dan ditandatangani oleh 11 partai politik yang hadir, saksinya, dan hanya 1 partai politik yang tidak menandatangani Model DA1-DPR LN, yaitu saksi dari Partai Demokrat.

Adapun hasilnya, Yang Mulia, ada di halaman 12, di tabel 4, sebagaimana yang terurai di dalam tabel tersebut.

122. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Dengan total surat suara sah sebanyak 117.426. Dengan disepakati dan telah ditandatanganinya Sertifikat Model DA-1 ini, maka telah sah dan selesailah proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPLN Kuala Lumpur.

124. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tidak selesai, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sudah selesai, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah selesai pada tanggal itu?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sudah ... sudah di selesai (...)

128. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah di seluruh ... seluruh surat suara yang dikirim lewat Pos, sudah masuk semua?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sudah masuk semua, namun karena memang batas waktu perhitungan itu ada batas waktunya, ada 17.770 yang di tidak (...)

130. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak terhitung? Oke.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Terhitung. Namun yang sudah dihitung sudah dituangkan dalam DA-1.

132. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

DA1-DPR LN.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

DPR LN.

134. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik, setelah selesai di tingkat PPLN Kuala Lumpur. Kemudian, selanjutnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi KPU RI di tingkat nasional, perolehan hasil suara ini disampaikan kembali.

Selanjutnya, mulai dari halaman 13, Yang Mulia.

136. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Karena terdapat keberatan dan perbedaan pendapat mengenai hasil perhitungan tersebut, maka pimpinan sidang pleno KPU RI pada saat itu memberikan kesempatan, baik itu kepada Bawaslu RI, kepada Panwas Luar Negeri untuk menyampaikan pendapatnya, dimana Bawaslu RI dan pe ... Pengawas Luar Negeri Kuala Lumpur tetap menyatakan bahwa batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei, yang dimaksud adalah diterimanya oleh PPLN Kuala Lumpur. Karena terdapat perbedaan tafsir terhadap Surat dari KPU Nomor 819, maka pimpinan sidang pada saat itu mempersilakan Ketua KPU RI menjelaskan apa maksud dari Surat Nomor 819 yang dikeluarkan oleh KPU RI tersebut?

Pada kesempatan itu, Ketua KPU RI, Bapak Arief Budiman menerangkan yang kami sampaikan, di sini transkripnya dan bukti rekamannya kami juga jadikan dalam Bukti P-19, yang pada intinya secara jelas KPU RI menerangkan bahwa penerimaan surat suara terhitung dari cap Posnya. Karena bisa saja penyampaian surat dari kantor Pos ke alamat tujuan menga ... menghadapi kendala.

Yang Mulia, dalam kasus a quo ini, standar prosedur kantor Pos di Malaysia untuk surat yang diterima pada tanggal tersebut akan dikirimkan ke alamat tujuan keesokan harinya. Nah, ini lah yang ... yang menjadi kendalanya, Yang Mulia. Selanjutnya, meskipun sudah diberikan penjelasan oleh Ketua KPU RI. Namun, Bawaslu RI tetap pada pendapatnya. Karena tetap pada pendapatnya, maka selanjutnya Bawaslu RI menyatakan akan mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya meminta agar surat suara yang diterima di kantor PPLN Kuala Lumpur setelah tanggal 15 Mei 2019, meskipun terdapat stempel Pos 15 Mei 2019, tidak dihitung dan suaranya dinyatakan tidak sah.

Atas keputusan tersebut, saksi dari Pemohon, dari kami menyatakan keberatannya yang pada pokoknya semestinya yang menjadi dasar perhitungan surat suara adalah kp ... KPU RI yang telah dijelaskan maksudnya oleh Ketua KPU RI bahwa stempel Pos yang berlaku.

Terhadap keberatan ini, saksi dari Partai Golkar juga menyampaikan keberatan yang sama dengan Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa pemilu itu pada hakikatnya adalah melindungi hak konstitusional warga negara dan selama ini perlindungan hak konstitusional tersebut menjadi hal Yang prinsipil yang dijalankan oleh KPU RI maupun oleh Bawaslu RI.

Karena ada perbedaan pendapat tersebut, maka kemudian Termohon pada rapat pleno di KPU RI melakukan break atau skorsing untuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI.

Selanjutnya, akhirnya Bawaslu RI tetap mengeluarkan rekomendasi lalu dilakukanlah perbaikan terhadap Formulir DA1-DPR RI Luar Negeri Kuala Lumpur yang lama dengan mengganti Formulir DA1-DPR RI Luar Negeri Kuala Lumpur yang baru berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI tersebut.

Atas perbaikan tersebut, maka terdapat perbedaan suara antara DA-1 yang ditetapkan di PPLN Luar Negeri Kuala Lumpur dengan yang telah diperbaiki di Jakarta pada saat pleno di (...)

138. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena ada rekomendasi Bawaslu itu, kan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

Dan terhadap perbedaan itu, terdapat selisih surat suara ... maaf, terdapat selisih suara sah sebanyak 43.701 suara yang tersebar dimiliki oleh berbagai partai politik, termasuk Partai Nasdem sebesar 35.306. Kemudian, setelah dilakukan perbaikan Formulir DA-1 Luar Negeri Kuala Lumpur, esok harinya dibacakan, dan kami dari Pemohon, saksi yang hadir pada saat pleno tersebut menyampaikan keberatannya di rapat pleno tersebut.

140. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang ... anu ... dipersingkat begini, Pak Taufik.

141. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Pemohon, suara yang benar setelah ... anu ... analisis dari Pemohon yang betul itu yang ada di dalam permohonan ini, ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 16 PKPI ini?

145. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jumlah total suaranya 2.666.492?

147. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perolehan Nasdem 161.745?

149. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya, totalnya.

150. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Totalnya itu, ya?

151. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang yang ditetapkan oleh Termohon bisa ... anu ... bisa menyampaikan di mana? Di tabel ini ndak ada, yang sudah ditetapkan oleh Termohon itu berapa? Yang benar menurut Anda, kan ini? Itu di (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Oh, ya. Ada di tabel (...)

154. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Disampaikan ke bukti, enggak?

155. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ada, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti berapa itu?

157. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Di tabel 1, Yang Mulia. Di halaman 5.

158. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tabel 1 halaman 5, di Permohonan Perbaikan, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR PERKARA 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya. Jadi, Termohon menetapkan suara Partai Nasdem 126.439. Setelah ada perbaikan DA-1 Luar Negeri tadi.

160. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

126. Jadi ada selisih 35.000 lebih itu, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Selisihnya 35.306.

162. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

306, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi (...)

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Tidak hanya Partai Nasdem saja, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Semuanya, kan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Semuanya juga memiliki selisih.

168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi yang perolehan ini kan sudah dibandingkan oleh Pemohon, kan?

169. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Sudah, Yang Mulia, di halaman 5.

170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, di halaman 5 itu, ya. Baik, kalau begitu, kan sudah ... ini. Terus, sekarang Petitumnya langsung.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Petitumnya (...)

172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini hanya Petitem untuk Dapil II saja toh berarti?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Petitem yang Nomor 2 dianggap tidak ada karena sudah di anu, ya, cabut, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya.

176. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Petitemnya hanya Petitem nomor 1.

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Baik.

178. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Untuk ... untuk Petitemnya, untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umur DPR RI Dapil DKI II. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

180. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya ini informatif.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang kedua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya untuk pemilihan ... Daerah Pemilihan Jakarta II.

182. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sepanjang daerah pemilihan, daerah Jakarta II, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya. Yang ketiga, menetapkan perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI I Jakarta II sebagai berikut, sesuai dengan tabel yang kami cantumkan di sini.

184. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil II, toh? Dapil DKI Jakarta II, toh?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar.

186. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Dapil DK ... Dapil DKI Jakarta II.

188. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan I, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

II, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, perolehan suaranya ini yang tertera di tabel?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang tertera di dalam tabel, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, totalnya yang tadi saya sebutkan tadi juga, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

194. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk Nasdem, 161.745.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk yang lain sudah ... kita tidak usah sebutkan, tapi yang penting untuk Nasdem ada kekurangan 35.306, ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu misalnya tidak dilakukan rekomendasi, berarti perolehannya sebagaimana ini juga, ya, berarti?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Benar, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Berarti, Anda mempersoalkan kesalahan rekomendasinya?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Betul.

202. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang kami anggap cacat hukum.

204. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak ... tidak ... apa ... tidak menghitung yang Pos terakhir itu, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya, tidak menghitung surat suara yang (...)

206. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Surat suara yang masuk pada tanggal (...)

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Yang diterima secara fisik pada tanggal 16 (..)

208. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cap Pos.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Meskipun cap Posnya (...)

210. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

15?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Tanggal 15 Mei.

212. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sudah bisa kita tangkap. Ada lagi, Pak Taufik?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Ya. Terakhir yang poin 4, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

214. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih, Pak Taufik.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK BASARI (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.

216. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia, ada tambahan, Prof? Cukup, ya. Baik, kalau begitu, sudah selesai, Pak Taufik. Terima kasih.

Sekarang kita ke Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Gerindra. Partai Gerindra? Baik, Permohonan Anda menyangkut apa sebelumnya? Ini ada permohonan partai, ada permohonan perseorangan, enggak? Ya? Ada 2?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, ada, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada permohonan partai dan ada permohonan perseorangan?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Perseorangan. Ya, betul, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang kita mulai dari ... di per ... anu ... permohonan itu di dalam satu berkas atau sendiri-sendiri?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Berbeda, Yang Mulia.

222. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berbeda?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang kita mulai yang permohonan partai dulu, ya. Nanti perseorangan yang berikutnya. Yang permohonan partai, itu permohonan yang awal diajukan kapan?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Tanggal 23 Mei, pukul 23.08 WIB, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini permohonannya digabung dengan Provinsi Sumut dan semuanya itu, ya?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya, betul.

228. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ini masuk pada tanggal 23 Mei?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

230. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pukul 23.08 WIB?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

232. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, perbaikannya jadi dipisah?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Perbaikannya dipisah, Yang Mulia.

234. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari glondongan tadi dipisah, kan?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

236. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Diterima pada tanggal 31 Mei?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Betul.

238. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pada pukul 03.25 WIB?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Betul.

240. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Betul.

242. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang berarti yang akan dibacakan yang sudah dipisahkan ini, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

244. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang saya tanyakan, Permohonan ini ada yang Permohonan DKI VII dicabut atau tidak? Karena di dalam permohonannya, yang dipisahkan ini masih ... yang glondongan ini jadi tidak berlaku untuk DKI atau masih berlaku?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Sudah dicabut, ada beberapa yang sudah kita cabut, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, yang berlaku hanya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Yang untuk DKI II dan DKI III untuk perorangan.

248. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan perbaikan permohonan?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya, siap.

250. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, saya lihat, ya. Jadi, yang masih hanya untuk Dapil DKI II?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

252. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nama Pemohonnya Biem Triani itu?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

254. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus ada lagi? Yang masih?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Di Dapil III atas nama R. Saraswati Djojohadikusumo, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang perseorangan?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, yang perseorangan.

258. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tapi yang partai hanya satu juga, ya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Satu, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, yang partai hanya ada satu, Dapil DKI Jakarta II, yang satu menjadi perorangan?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kemudian yang sekarang partai dulu. Yang partai, Permohonan ini ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen, ya, Pak Prabowo dan Pak Ahmad Muzani.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

264. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya. Ya, tenggang waktunya tidak ada masalah, kedudukan hukum juga tidak ada masalah, kewenangan juga tidak ada masalah. Saudara mempersoalkan keputusan KPU, kan? Tidak masalah. Kemudian sekarang apa Posita dalil-dalil yang Anda kemukakan dengan permohonan ini di Dapil DKI II karena ini hanya sedikit. Silakan Saudara kemukakan. Jadi, gimana ini?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara menyandingkan perolehan suara partai politik, ya?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

268. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

270. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Silakan.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Izinkan, Yang Mulia, saya membacakan pokok-pokok permohonan.

272. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Karena melang ... apa namanya ... ini kan sedikit.

274. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Jadi mungkin ta ... tabelnya izin, enggak saya bacakan.

276. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tabel dianggap telah dibacakan, ya?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya, siap.

278. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tabel itu ada urutan perolehan suara dari Partai Nomor 1 sampai dengan Partai Nomor 20, ya?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

280. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan. Terus?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Provinsi DKI Jakarta DPR RI Dapil DKI Jakarta II, nama Pemohon H. Biem Triani Benjamin.

282. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak masalah.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Oke.

284. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Langsung saja dianu.

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Langsung pokok ke ... pokok (...)

286. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pokok (...)

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Permohonan yang kami (...)

288. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Positanya, ya.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Mohonkan adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi penambahan suara luar negeri yang tidak wajar. Untuk perolehan suara Partai Golkar. Dimana perolehan suara dalam negeri jauh lebih rendah dibanding luar negeri.

290. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Poin kedua. Bahwa (...)

292. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini Buktinya P-01, ya?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

P-01, Yang Mulia .

294. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Bahwa pembatalan suara Nasdem di PPLN Kuala Lumpur karena ketidakwajaran menjadi logika juga, logika yang sama dengan suara luar negeri lainnya. Dimana pencoblosan dan penghitungan suara luar negeri jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan umum partai tersebut di dalam negeri. dikuasai oleh sebagian caleg dan partai dan diduga terjadi karena adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis. Buktinya juga P-01, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Poin ketiga. Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka suara luar negeri dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga komposisi suara dapil DKI Jakarta II hanya bersumber dari daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sehingga komposisi suara menjadi ... yang di dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Mungkin saya bacakan untuk Nomor Urut 2.

300. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Gerindra Jakarta Pusat 92.000 (...)

302. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

792.

304. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Jakarta Selatan 222.636.

306. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Yaitu dengan jumlah 315.428.

308. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

309. KUASA HUKUM PEMOHON 150: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Untuk (...)

310. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang dari luar negeri?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Yang dari (...)

312. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini (...)

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Luar negeri 66.905.

314. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

66.905?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

316. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, untuk Gerindra saja ya itu, ya?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya, untuk Gerindra saja.

318. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus?

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Nah, untuk itu, kami langsung masuk ke Petitum.

320. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitum. Silakan!

321. KUASA HUKUM PEMOHON 150: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Yang pertama, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

322. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, se ... langsung sepanjang (...)

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Nomor sekian.

324. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk daerah pemilihan DKI II?

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Khusus untuk Daerah Pemilihan Provinsi DKI ... ya, benar, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus? Perolehan suara yang benar?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Berdasarkan sesuai dengan tabel ... yang ada di tabel, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

330. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

332. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Silakan.

335. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tadi dari Gerindra, ya? Jakarta Pusat 92.792. Kemudian yang Jakarta Selatan 222.236, luar negeri 66.905. Ini bisa enggak diuraikan nih Gerindra yang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan seperti itu, ada di TPS-TPS mana saja itu? Ini kan tidak ada nih, hanya glundung saja toh ini? Ini jumlah ini dari mana saja diperoleh? Apakah ada dibuktinya lengkap?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII: ALI LUBIS (GERINDRA)

Itu kalau untuk secara global, Yang Mulia, untuk per TPS itu memang kita tidak cantumkan.

337. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi TPS-nya ndak ada ini?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII: ALI LUBIS (GERINDRA)

Ya.

339. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di bukti pun tidak ada? Untuk mencantumkan dapatnya angka segi ... seperti itu dari mana?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII: ALI LUBIS (GERINDRA)

Dari rekapitulasi hasil suara keseluruhan KPU.

341. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keseluruhan itu kan dari TPS-TPS juga, kan?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII: ALI LUBIS (GERINDRA)

Ya, tapi kita tidak boleh (...)

343. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Anda cantumkan (...)

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII: ALI LUBIS (GERINDRA)

Per TPS.

345. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik kalau begitu.

346. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di ... yang Anda persoalkan itu kan persoalan yang penyelenggaraan PPLN Kuala Lumpur, kan? Untuk yang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tidak dipersoalkan, ya?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

348. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, ini yang akan kita ... sebetulnya hampir sama dengan permohonannya Pak Taufik ya, ini, ya? Tapi Pak Taufik memperjuangkan Partai Nasdem dan Saudara memperjuangkan Partai Gerindra yang di Kuala Lumpur?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

350. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau Pak Taufik bisa menguraikan kenapa terjadi demikian, tapi kalau Gerindra secara global bahwa ini ternyata enggak benar karena ada ... apa ... apa yang sebetulnya dikemukakan oleh Pak Taufik tadi, gitu.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Ya.

352. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nanti, kita cross-check dengan kepunyaan Termohon itu, ya.
Baik, yang sekarang sudah selesai untuk Gerindra, yang satunya sekarang, yang permohonan perorangan, atas nama ... siapa Bu, tadi?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

R. Saraswati Djojohadikusumo.

354. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bu Saraswati? Ya.
Ini tadi jadinya gelondongan, terus kemudian di perbaikan dikeluarkan jadi satu ... satu, ya? Perorangan, ya?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia. Tapi (...)

356. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, perorangan ini ada rekomendasi dari pimpinan partainya?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ada, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada. Baik, kalau begitu, mempunyai kedudukan hukum. Terus, kita mulai. Apa itu yang jadi masalah?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.
Jadi, sebelumnya izinkan kami untuk memperbaiki, dalam arti (...)

360. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, sebentar ... sebentar!
Di dalam Permohonan yang pertama, yang gelondongan, itu yang perorangan ini sebetulnya enggak ada?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Enggak ada, ya, sebetulnya?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Kita masuk di dalam perbaikan permohonan.

364. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba sebentar, sebentar!
Ini yang DKI malah sebetulnya yang ada, yang perorangan adalah Nuraina, Jakarta Dapil VII. Tapi, kemudian di perbaikan, ini muncul tambahan ini?

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia. Jadi, kami muncul pas ... pada saat perbaikan permohonan.

366. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, sekarang yang jadi masalah ... yang jadi masalah, tenggang waktunya kalau begitu. Karena permohonan perorangan yang dikelupaskan tadi, itu kan ini kapan yang permohonan ini perorangan diajukan? Tanggal 31 (...)

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

31 Mei (...)

368. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mei, Pukul 18.56 WIB. Ya, betul?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ada bukti 17.

370. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Ini kan ... coba, betul enggak? Anda diterima di Mahkamah, permohonan perbaikan yang dikeluarkan atas nama Bu Saraswati tadi.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

He em.

372. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu 30 ... Jumat, 31 Mei 2019?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.

374. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pada pukul 18.56 WIB?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia. Jadi kita sama dengan (...)

376. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya. Perbaikan (...)

378. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, padahal semestinya (...)

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Perbaikan permohonan ... bersamaan dengan perbaikan permohonan dari (...)

380. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ini jamnya perbaikan yang partai, itu kan ada di yang asli, perbaikan yang masuk pada tanggal 23, terus diperbaiki tanggal 31, pukul 03.25 WIB. Tapi yang perorangan ini, masuknya 31 Mei, pukul 18.56 WIB?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi, kita masuk memang di tanggal 31 Mei.

384. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul? Jadi, itu untuk perhatian Pemohon, ya, nanti. Silakan kalau mau Anda bacakan. Gimana? Jadi, tenggang waktunya perbaikan permohonan yang atas nama Ibu Saraswati itu diterima di Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pada pukul 18.56 WIB, ya. Yang semula di permohonan asli tanggal 23 tidak ada, tapi ini sekarang ada perbaikan begini, tapi diterima di sini. Ini berarti kayak bukan perbaikan, tapi ini kayak tambahan, gitu?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya. Tambahan, Yang Mulia. Jadi, kami menambahkan karena (...)

386. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik (...)

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Kami menganggap tambahan ini satu kesatuan dengan yang sudah dimasukkan, gitu.

388. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi, kami menyusulkan seperti itu.

390. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti ... nanti direspons, ya. Pihak Terkait juga bisa merespons itu.

Yang lama sudah dicabut kan, yang ini tadi, Prof? Ya. Yang untuk Nuraini tadi kan sudah dicabut, tinggal satu itu tadi.

Sekarang yang ini, sekarang. Jadi, waktu penambahan itu 31 Mei 2019, pada pukul 18.56 WIB, ya? Silakan, sekarang apa yang dipersoalkan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda mempersoalkan di Provinsi DKI Jakarta, Dapil (...)

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Dapil III, Yang Mulia.

394. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dapil III. Padahal di dalam yang bundel 1, ini enggak ada, tidak dipersoalkan di sini. Jadi, ini bukan perbaikan, tapi penambahan dapil baru, ya? Oke. Silakan!

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, memang penambahan dapil baru dari ... kami menganggap bahwa ketika itu dimasukkan bersamaan dengan perbaikan

permohonan, kami menganggap ini menjadi satu kesatuan dari kami. Mungkin itu tergantung kebijakan dari Mahkamah (...)

396. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Untuk menilainya (...)

398. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini tadi ada perbedaan pada waktu yang mengeluarkan dari bundel, yang ini, itu masuknya 31 Mei 2019, pada pukul 03.25 WIB.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya.

400. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ini Anda sendiri masuknya pada pukul 18.56 WIB, ya? Beda tapi. Tidak berbarengan ini, waktunya beda. Ya, terus, silakan!

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk masalah tenggang waktu, kami persilakan kepada ... serahkan kepada Yang Mulia.

402. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Hanya terkait dengan klaim Permohonan kami, di sini bicara mengenai renvoi yang sudah kami masukkan. Kami ingin merenvoi bahwa sebenarnya suara kami ... yang kami klaim adalah sebesar 29.556. Jadi, sementara di dalam Permohonan kami itu 9.556.

Berdasarkan bukti yang sudah kami serahkan kepada Mahkamah, kami sudah memperhitungkan bahwa ... bahwa kehilangan suara kami itu adalah benar-benar sebesar 29.556. Itu didasarkan pada adanya suara ... perbedaan suara antara versi Pemohon dengan versi Termohon, dimana Pemohon memprediksi bahwa suara Pemohon di sini adalah sebesar 373.687, sementara Termohon di sini sebesar 344.131, sehingga ada selisih suara sebesar 29.556, Yang Mulia. Karena ada ... karena ada renvoi, kemudian ... dan berpengaruh kepada suara, maka kami juga di sini ada penambahan dalil, Yang Mulia.

Nah, untuk penambahan dalil itu tidak terlalu prinsipil sebenarnya, kami hanya menambahkan dalil bahwa kalau semula di dalam permohonan awal kami itu kami hanya menyandingkan (...)

404. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sebentar, sebentar, sebentar! Di dalam permohonan Saudara, Partai Gerindra ini menurut Termohon (...)

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya.

406. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jumlahnya di sini tertulis 343.129, betul itu?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Itu di ... di ... ini yang setelah kami renvoi, Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kapan renvoinya?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Hari ini, Yang Mulia.

410. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh (...)

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Hari ini kami mohon renvoi (...)

412. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, minta direnvoi (...)

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Hari ini kami mohon renvoi, sehingga dari hasil renvoi ... renvoi kami ini, harapan kami adalah (...)

414. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, ya ... ya (...)

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terjadi penambahan dalil, Yang Mulia, seperti itu.

416. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang, sekarang direnvoi. Menurut Anda, Termohon ituemper ... menurut Termohon, Partai Gerindra yang tadinya tertulis 343.129, menurut Anda yang sekarang yang mau direnvoi berapa?

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

344.131.

418. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

344?

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

131.

420. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

131, ya?

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Sementara versi Pemohon di sini adalah 373.687, Yang Mulia.

422. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang menurut Pemohon, yang di sini tertulis 35.268 (...)

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya.

424. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang betul berapa?

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

373.687.

426. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

373?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

687.

428. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

687. Berarti ada selisih berapa?

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Sekitar (...)

430. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan sekitar kok, pasti kok (...)

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Tadi 29. Ya, pasti, Yang Mulia, 29.556 suara.

432. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

29.556.

434. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

29.000?

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

556.

436. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

556. Kalau ini tadi kan, Saudara hanya mengatakan 9.556, kan?

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul, Yang Mulia.

438. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini direnvoi?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

He eh, direnvoi (...)

440. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus gimana?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi 29.000. Karena ada renvoi, kami me ... ada penambahan dalil tentu saja berpengaruh dengan itu (...)

442. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kalau penambahan dalil, kan sudah enggak bisa. Untuk renvoi itu hanya menyangkut redaksional saja. Gimana sekarang?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, kami serahkan kepada Yang Mulia saja kalau seperti itu.

444. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya gimana sekarang? Setelah ada renvoi itu akhirnya sebetulnya Anda menghendaki dalil apa yang anu?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Yang kami kehendaki adalah bahwa suara yang hilang di sini untuk Dapil III itu adalah sebesar 29.556.

446. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, bukan 9.556?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia. Sehingga (...)

448. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi suara yang hilang itu selisih yang tadi itu?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul, Yang Mulia.

450. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus berarti di dalam petitum Anda minta dikembalikan sebagaimana yang Anda dalilkan tadi, gitu?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul, Yang Mulia. Jadi itu saja sebenarnya.

452. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti bukan 9.566, tapi 29.556, gitu?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia.

454. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu di dalam petitemnya itu, sehingga ... terus yang menyangkut perorangan ini gimana?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Dari suara yang hilang itu terdapat sekitar 4.158 suara (...)

456. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk kepentingan Ibu Saraswati (...)

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Saraswati, betul, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi ada seperti itu, Yang Mulia.

460. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini. Nanti direspons, ya, Termohon, ya? Baik, ada lagi, Bu?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Bukti-bukti sudah kami masukkan untuk memperkuat ... apa ... untuk memperkuat bahwa suara kami itu adalah 29.556 (...)

462. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Buktinya berapa?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Dengan ... kami ada Bukti P-1 sampai dengan P-36 di sini yang sudah kami serahkan, Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

P-36 sudah diserahkan.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

He eh. Dimana kami uraikan menjadi beberapa kelurahan, ada Kelurahan Kalibaru (...)

466. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Di situ ada Bukti (...)

468. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti sudah diserahkan, ya?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Sudah, Yang Mulia.

470. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi, Buktinya adalah P-1.1 sampai dengan P-130. Per-kelurahan kami kemukakan, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Kemudian di Kelurahan Lagoa P-21 sampai dengan P-26. Untuk selanjutnya sudah ada di daftar bukti yang sudah kami serahkan, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Nanti kita lihat, kita cek. Sudah diverifikasi tinggal nanti kita sahkan. Ada lagi? Cukup?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Cukup, Yang Mulia.

476. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu sudah selesai, ya?

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Jadi kami hanya mengklaim ... suara untuk (...)

478. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Saraswati saja, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Terima kasih, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada lagi? Cukup, ya? Baik, untuk Partai Gerindra sudah kita selesaikan.

Sekarang untuk PKB. Ya, PKB silakan!

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

484. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, siap, ya? Saya pandu biar agak cepat.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Siap.

486. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda mengajukan permohonan yang pertama pada tanggal 24 Mei, ya? Betul?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Benar, Yang Mulia, benar.

488. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

24 Mei pukul 00.01?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Benar, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Persis ini, ini juga yang tunggu di Gedung MK pada keluar kalau pukul segini ini. Terus kemudian perbaikannya hari Rabu, 29 Mei, pukul 19.33 WIB, betul?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, benar, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi sekarang, perbaikan ini mencabut per ... permohonan yang pertama?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia.

494. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang berlaku adalah perbaikan permohonan, ya?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita lihat sekarang yang perbaikan permohonannya. Untuk perbaikan permohonan, Mahkamah berkewenang mengadili jadi, ya, kewenangan Mahkamah memenuhi persyaratan, Pemohon mempunyai kedudukan hukum.

Jadi karena ini ditandatangani ... anu ... ya, Pak Muhaimin, ya?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia.

498. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama Pak Dhakiri, ya?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Siap.

500. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus kemudian masih dalam tenggang waktu, tadi saya sebutkan sudah. Sekarang persoalannya apa? Di mana? Ini antarpartai, ya?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Bukan, Yang Mulia.

502. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini internal partai?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Tidak, ini terkait mengenai proses ketika PSU di Dapil Jakarta II, di Kuala Lumpur, Yang Mulia.

504. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, begitu?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya.

506. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, coba ... coba di sampaikan?

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

508. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Assalamualaikum wr. wb.

510. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Perkenalkan kami Kuasa Hukum dari perkara 0 ... Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

512. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Akan menyampaikan beberapa poin, terkait mengenai pokok permohonan, langsung, Yang Mulia?

514. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Bahwa Pemohon keberatan atas perhitungan dan penetapan Suara Pemilihan Legislatif DPR RI, Dapil DKI Jakarta II 2019, di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan metode undi Pos, dengan isi keberatan sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa PPLN Kuala Lumpur Malaysia di mana ketua kom ... di mana Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua KPU RI, Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta sedang ... serta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait penyelenggaraan etika penyelenggara pemilu yang tidak jujur, profesional.

Dua. Bahwa pada sidang pleno luar negeri, Kuala Lumpur yang di pimpin oleh Hasyim Asy'ari... Saudara Hasyim Asy'ari, KPU RI mengabaikan hasil investigasi Panwaslu Kuala Lumpur tentang adanya alamat fiktif dengan mengatakan alamat yang masih dipertanyakan. Padahal jelas tertuang pada surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur, ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Saudara Yazza Azzahra Ulyana dengan dokumen A2-KPU-LN, dokumen terlampir, Yang Mulia, dengan tanggal 18 Mei 2019. Bahwa alamat tersebut fiktif.

Tiga. Bahwa meminta dibukanya data DPT fiktif sesuai dengan surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur dan membuka seluruh DPT yang di ... yang diduga idetik ... identifikasi fiktif.

Empat. Bahwa berdasarkan perhitungan suara ulang di PPLN Kuala Lumpur dengan metode undi Pos, perolehan suara Saudara Ahmad Iman, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019 dan suara Partai Kabangkitan Bangsa adalah sebanyak 208 suara.

Lima. Bahwa semestinya Saudara ... maaf, Yang Mulia. Bahwa semestinya suara Saudara Ahmad Iman dan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada PPLN Kuala Lumpur melebihi dari 208 suara.

Hal ini karena PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak lengkap, sehingga suara ... surat suara yang dikirim melalui Pos tidak sampai ke alamat pemilih yang dituju, hal ini sangat merugikan peserta pemilu terutama dari Saudara Iman ... Ahmad Iman.

Enam. Bahwa mengenai alamat pemilih yang dimanipulatif dan tidak lengkap, Panwaslu Kuala Lumpur telah menyampaikan keberatan kepada PPLN Kuala Lumpur pada tanggal 18 Mei 2019, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur. Disebutkan bahwa alamat yang dikirim oleh PPLN Kuala Lumpur kepada pemilih fiktif.

Tujuh. Bahwa Panwaslu Kuala Lumpur telah melakukan investigasi pada alamat yang dikirim dengan metode random, sampling, mencatat alamat pemilih pada surat suara yang kembali pada tanggal 14 Mei 2019, dari Pemilih dan melakukan cek turun langsung ke lapangan ... ke alamat lang ... ke alamat tersebut, dan ternyata tidak ada pemilih pada alamat tersebut, dan juga telah menyampaikan keberatan terhadap PPLN Kuala Lumpur. Namun, PPLN Kuala Lumpur sama sekali tidak menanggapi keberatan tersebut.

Delapan. Bahwa selain alamat fiktif PPLN Kuala Lumpur juga melakukan pelanggaran terhadap jadwal penerimaan surat suara pada saat pemungutan suara ulang, dengan metode Pos, dimana (...)

516. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sama dengan yang tadi disampaikan, Pak Taufik, ya?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia.

518. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan poin delapan.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Baik, dianggap dibacakan.

520. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Sembilan, bahwa terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kuala Lumpur telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang ... yang telah ditetapkan.

522. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Itu juga terlampir, alat buktinya, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Sepuluh. Bahwa ... bahwa pada sidang pleno rekapitulasi suara di KPU RI, surat suara pemungutan suara ulang yang diterima melalui Pos hingga tanggal 15 Mei 2019 adalah sebanyak 22.807 pemilih.

Diputuskan untuk tetap menjadi surat suara sah, selebihnya adalah surat suara yang diterima melewati tenggat waktu yang telah disepakati, yakni tanggal 15 Mei 2019, menjadi surat ... suara tidak sah, sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu RI, tertanggal 19 Mei 2019, pada saat sidang pleno rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur metode undi Pos.

Demikian mengenai pokok permohonannya.

526. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petitumnya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Terkait mengenai Petitum. Maka berdasarkan kepada seluruh fakta tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi c.q. mas ... Mejlis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut.

Satu. Menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas.

Dua. Menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui Pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur

sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan melewati ... dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019, menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara.

528. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sebaliknya mintanya. Ya, baik.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

530. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

531. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon?

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia.

533. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Anda melampirkan bukti apa saja? Bukti yang Anda lampirkan di sini? Bukti-buktinya.

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Untuk saat yang kemarin kita ajukan ada 5, Yang Mulia. Tetapi kemudian kalau diperkenankan hari ini kita akan menambahkan menjadi 25 totalnya, Yang Mulia.

535. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, termaksud SK KPU-nya juga?

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Siap, Yang Mulia.

537. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian yang Anda ingin yang di ... apa ... diminta itu yang benar tidak dimasukkan sama sekali?

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Tidak dimasukkan, kami hanya berbicara mengenai proses PSUnya, Yang Mulia.

539. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu.

540. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik, kalau begitu. Ada lagi yang akan disampaikan?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Jelas.

542. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Cukup, Yang Mulia.

544. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tadi bukti yang ada tambahan segera diserahkan!

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Baik, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ada.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya. Tapi mohon izin maaf, Yang Mulia. Kita belum membuat ... apa namanya ... list alat buktinya, tapi alat buktinya sudah kita siapkan dan sudah dileges.

548. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang ditulis tangan saja, segera!

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Baik, Yang Mulia.

550. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Daftar alat buktinya sambil kita tuntun, fisiknya diserahkan.

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Baik, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petugas tolong diambil! Daftar buktinya ditulis, ya!

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya.

554. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba Anda menugaskan satu orang yang untuk bisa itu segera, berkoordinasi. Apa tambahannya? Di bukti yang sudah ada daftarnya, itu ditambahkan, gitu saja ditulis, biar cepat.

Sekarang, Partai Golkar.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Terima kasih, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih.

Untuk Partai Golkar, mana ini? Di belakang?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.

558. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pak Heru. Ya, Pak Heru. Ini sudah enggak pilpres, ya, Pak Heru, ya. Pak Heru jadi ngetop sekarang karena pilpres. Dapat borongan banyak enggak yang pilegnya, Pak Heru? Ya, supaya ... anu ... jangan tegang, ya, Pak Taufik, ya?

Ini permohonan yang pertama diterima 24 Mei, pukul 00.02 WIB, ya?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Benar, Yang Mulia.

560. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul, baik. Ini ... anu, ya ... permohonan partai politik, ya?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

562. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terus ada perbaikan 31 Mei, pukul 08.21 WIB masuknya?

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

564. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berarti yang permohonan pertama dianggap tidak berlaku?

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

566. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang berlaku sekarang perbaikan, ya?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Perbaikan yang tanggal 31 Mei.

568. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 31 Mei. Ini yang dipersoalkan di mana, ini?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Dap ... DKI III ... DKI Jakarta III, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jakarta III. Enggak ikut-ikutan yang Jakarta II, tadi? Baik, ada persoalan apa di Jakarta III menurut Pemohon?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Intinya, Yang Mulia. Ada pengurangan maupun ada juga penggelembungan (...)

572. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penambahan, ya? Penambahan (...)

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Tetapi total perolehan untuk seluruh partai mengalami penggelembungan.

574. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Yang signifikan, yang merugikan perolehan suara justru untuk Pemohon, Yang Mulia.

576. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Gimana, itu?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model DC, untuk perolehan suara dan perolehan kursi untuk Dapil DKI III alokasinya adalah 8 kursi yang memperoleh, satu Gerindra, PDIP mendapatkan 3 kursi, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Sementara, Pemohon Golkar sama sekali tidak ... apa ... tidak memiliki kursi, Yang Mulia.

578. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di (...)

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kemudian berdasarkan rekapitulasi tersebut, Pemohon mendapatkan suara sebesar 80.414 suara dan Partai Amanat Nasional mendapatkan suara 123.537, sehingga, selisih antara Pemohon Partai Golkar dengan Partai Amanat Nasional sebesar 43.123 suara, Yang Mulia.

580. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Berdasarkan perhitungan tersebut, kursi ke-8 Dapil DKI III ditetapkan diperoleh oleh Partai Amanat Nasional karena rekap ter ... karena (...)

582. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu menurut Termohon, ya?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, menurut Termohon.

584. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, baik disengaja ataupun karena kelalaiannya. Khususnya di tingkat TPS C-1 dengan data DAA tingkat kelurahan di setiap kelurahan menunjukkan selisih suara yang cukup besar dan berakibat telah berkurangnya perolehan suara pemohon, dan

kemudian menggelembungkan atau menambah secara signifikan perolehan suara untuk partai lain yang dapat dilihat berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kotamadya Jakarta Utara (...)

586. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, saya potong. Untuk Dapil Jakarta III itu berapa kecamatan yang Anda persoalkan? 11?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kita 11 kecamatan, Yang (...)

588. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

11 kecamatan, ya?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

590. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Seluruhnya ada berapa kecamatan sebetulnya 11 ini? Semua di kecamatan di Dapil III ini menurut Anda bermasalah?

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Tidak semua, Yang Mulia.

592. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak semua.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Hanya ada di 11 kecamatan saja.

594. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

11 kecamatan saja?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

596. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mulai dari Cilincing sampai Grogol Petamburan itu?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

598. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, Saudara menguraikan dengan buktinya juga ada. Ada selisih-selisih (...)

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

600. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang menurut perhitungan Pemohon berbeda dengan Termohon, ya?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

602. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, silakan.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Dar ... dari pencermatan dengan menyandingkan data C-1 dengan data DAA, dari 11 kecamatan di Dapil DKI Jakarta III, ditemukan adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimuat dalam DA dan DB dengan perolehan suara yang dimuat dalam C-1 DPR

berkurang untuk Pemohon sebesar 55.214. Tetapi, dari persandingan C-1 dengan DAA, DA, DB, total seluruh partai mengalami pengelembungan yang signifikan, Yang Mulia.

604. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kemudian, di ... dari tabel persandingan antara C-1 DPR dengan DAA di 11 kecamatan tadi, dapat Pemohon uraikan per kecamatan mengenai adanya penambahan suara di DAA di seluruh partai politik di-11 kecamatan Dapil III tersebut.

Untuk di Kecamatan Cilincing, ada 7 kelurahan terdapat selisih sebesar 8.601 suara.

606. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Untuk di Kecamatan Koja, terdapat 6 kelurahan terdapat selisih 29.654 suara. Kemudian, di Kebon Jeruk ada 7 kelurahan, selisih 9.863. Kemudian, di Kecamatan Palmerah ada 6 kelurahan, selisihnya 6.138 suara. Kemudian, di Taman Sari ada 8 kelurahan, selisihnya 13.083 suara. Kemudian, di Tanjung Priok ada 7 kelurahan, Yang Mulia, itu selisihnya 9.247 suara. Kemudian, di Kembangan ... di Kembangan 6 ... terdapat 6 kelurahan, terdapat selisih 11.364. Kemudian, di Tambora ada 11 kelurahan, ada selisih 7.050 suara. Kemudian, di Penjaringan ada 5 kelurahan, terdapat selisih 7.654. Kemudian, di Pademangan ada 3 kelurahan, selisihnya 1.248. Kemudian, di Grogol Petamburan ada 7 kelurahan, selisihnya 6.428.

608. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Totalnya adalah?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Jika ditotal terdapat selisih 206.871, Yang Mulia. Oleh karena itu, berdasarkan persandingan yang telah dilakukan oleh Pemohon, perolehan suara partai politik berdasarkan C-1 yang seharusnya menjadi acuan bagi Termohon untuk menuangkan dalam Form DAA di 11 kecamatan se-Dapil DKI Jakarta III secara berjenjang sampai Form DC sebagaimana yang akan Pemohon uraikan sebagai berikut. Untuk PKB (...)

610. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, anu aja, sebut saja yang Nomor 1 PKB, tapi yang lain dianggap telah dibacakan.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

PKB sebesar 71.548, sementara Golkar (...)

612. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Golkar?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Pemohon 135.628, Yang Mulia.

614. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Nomor ... PSI berapa?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

PSI 244.167, Yang Mulia.

616. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Demokrat?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Untuk Demokrat sebesar 133.666 suara.

618. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Yang terakhir, di PKPI?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Di PKPI itu sebesar 2.957 suara, Yang Mulia.

620. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, totalnya?

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Totalnya 2.000 ... 2.295.476 suara, Yang Mulia.

622. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, perolehan suara partai yang lain dianggap telah dibacakan, ya.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Baik, terima kasih.

624. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini sesuai semuanya, ya?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Ya, Yang Mulia.

626. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sekarang Petitumnya?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kemudian Petitemnya. Sesuai dengan dalil-dalil yang kami sampaikan, didukung dengan bukti kami yang kami ajukan dari mulai P4-1 sampai dengan P4-153, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, membat ... membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III.

628. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III sebagai berikut.

630. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, ya?

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, untuk (...)

632. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

1 sampai 16.

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

634. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang sat ... Nomor 1 (...)

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Untuk Golkar sebesar (...)

636. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar. Yang nomor (...)

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

135.628 suara.

638. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, totalnya 229 ... 2.200.000 (...)

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

2.295.476 suara.

640. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya. Yang lain dianggap dibacakan.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Kemudian, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta III dengan membuka C-1 Plano. Atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Dapil DKI Jakarta III.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

642. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

644. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ada tambahan Prof, silakan!

645. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon apakah ada keberatan pada waktu melihat bahwa ini ternyata ada persandingan yang berbeda itu? Ada enggak keberatan pada waktu itu?

646. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Ada, Yang Mulia.

647. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibuktikan juga keberatannya? Sudah ada buktinya?

648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Sudah.

649. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ... ini kan sifatnya gelundung, ya? Permohonan ini, ya? Artinya langsung menyebutkan 11 kecamatan itu yang dianggap ada perbedaan.

650. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

651. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan per TPS-nya?

652. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

TPS kami sudah ajukan sampai dengan P-153.

653. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada juga?

654. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul.

655. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

656. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, Prof? Baik, terima kasih.
Ada lagi yang ingin ditambahkan? Atau sudah cukup?

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

658. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada tambahan bukti? Kalau ada, di ... segera disampaikan.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

660. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, sudah semua, ya?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Ya.

662. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu sudah selesai untuk Partai Golkar. Sekarang Partai Berkarya, tidak hadir, ya, dianggap Pemohonnya kabur. Bukan permohonan kabur, tapi Pemohon kabur ini. Enggak tahu itu kalau itu direaksi kayak apa itu sama Termohon itu, kabur. Apa tidak serius atau apa, terserah itu reaksinya apa.

Sekarang yang terakhir Partai Demokrat untuk sesi sore ini.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Assalamualaikum wr. wb.

664. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. Saya (...)

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

666. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Yang Mulia (...)

668. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya, saya anukan. Anda mengajukan permohonan pada Jumat, 24 Mei 2019, pada pukul 01.04 WIB, ya?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.

670. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada perbaikan?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Tidak ada, Yang Mulia.

672. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada, ya? Jadi, yang dipakai dalam Permohonan ini adalah Permohonan yang awal yang disampaikan pada hari Jumat, 24 Mei 2019, pada pukul 01.04 WIB, ya?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Baik, Yang Mulia.

674. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Terkait tentang Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan Tenggang Waktu dianggap dibacakan.

676. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Akan tetapi dalam Kewenangan Mahkamah di halaman 4 poin 2 di situ tertulis *sampai dibentuknya peradilan khusus* itu kami coret, Yang Mulia.

678. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, ya. Ya, *peradilan khusus* ya memang ini wong ikut Konstitusi kok.

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Ya, Yang Mulia. Di situ (...)

680. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau pilkada, lah itu, ya.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Baik, Yang Mulia.

682. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berarti dicoret, sadar sendiri sudah, ya?

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Ya.

684. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu mau dikoreksi soalnya.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Baik, Yang Mulia. Jika diperkenankan, tidak kami bacakan karena perkara sebagaimana dimaksud dicabut, Yang Mulia.

686. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini ... begini, ini dicabut, ya? Saya mau koreksi, jadi enggak jadi. Ya, diteruskan gimana? Sudah selesai? Enggak, saya kira mau dicabut terus dihidupkan kembali. Saya siap mau koreksi beberapa pasal yang salah, macam-macam. Oh, jadi sudah dicabut?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Dicabut, Yang Mulia.

688. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Resmi dicabut, ya?

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Resmi, Yang Mulia.

690. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Suratnya sudah masuk?

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Menyusul, Yang Mulia.

692. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi di dalam persidangan ini dinyatakan oleh kuasa. Siapa yang menyatakan dicabut ini? Nanti dicatat dalam Berita Acara ini. Nanti yang cabut ternyata tidak ada dalam Surat Kuasa kan, kita repot juga itu.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

DPP, Yang Mulia. Melalui Kuasa Hukum karena DPP sudah memberikan kepada Kuasa Hukum.

694. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Kuasa Hukum siapa yang menyatakan itu di sini?

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Saya sendiri, Yang Mulia, Muhajir.

696. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor berapa ini?

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Di dalam permohonan (...)

698. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan nomor?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Kalau nomor Surat Kuasa, sama.

700. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Namanya lengkap, Pak siapa ini?

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Muhajir.

702. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Muhajir. Pak Muhajir itu nomor berapa di sini? Ada, Muhajir, S.H., M.H.?

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Betul, Yang Mulia.

704. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Wah, ini tanda tangannya ruwet sekali ini nih. Tapi apa yang disampaikan sangat simpel dan tegas, tapi tanda tangannya ruwet. Terima kasih, Pak Muhajir, ya?

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Sama-sama, Yang Mulia.

706. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sudah selesai, saya kembalikan pada Ketua.

707. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Itu kelihatan serius, eh, akhirnya dicabut. Ya, baik. Kita mengesahkan dulu bukti yang diajukan.

Untuk Partai Nasdem Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti P-1 Nasdem, ya, sampai dengan P-21, Nasdem Jakarta II RI, ya?

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Benar, Yang Mulia. Tapi ada tambahan juga yang sudah kita masukkan, Yang Mulia. Terus sedikit ada renvoi pada Bukti P-2 bagian keterangan sebelumnya, ter ... di situ tertulis *sebelumnya* direnvoi menjadi *setelah*. Pada bagian keterangan.

709. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. *Sebelum* jadi *setelah*, ya?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Betul, Yang Mulia.

711. KETUA: ANWAR USMAN

Tambahan bukti?

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Tambahan Bukti P-22 (...)

713. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah selesai?

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Sampai P-27 sudah diserahkan juga, Yang Mulia.

715. KETUA: ANWAR USMAN

Kapan?

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Tanggal 3 Juli, pukul 10.37 WIB, Yang Mulia.

717. KETUA: ANWAR USMAN

3 Juli. Ya, sebentar, ya. Lagi dicek dulu.

Kita lanjut dulu ke Partai Gerindra, Perkara Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti yang diajukan P-2, DPR RI P-1 sampai dengan P-2, DPR RI.5. Ya, benar, ya?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD FATONI (GERINDRA)

Benar, Yang Mulia.

719. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB, P-1 sampai dengan P-5?

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia. Tapi kan ... apa ... ada penambahan alat bukti. Jadi, total jadi P-25, Yang Mulia.

721. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diserahkan, ya?

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Sudah, lagi disiapkan ini, Yang Mulia.

723. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, lagi disiapkan? Sudah di ... sudah dileges?

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Sudah ... sudah. Alat bukti sudah dileges.

725. KETUA: ANWAR USMAN

Oh.

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Hanya kita sedang membuat list, daftarnya saja, Yang Mulia.

727. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, yang tadi, ya?

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia, yang tadi.

729. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian, untuk Partai Golkar, Nomor 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bukti P.4-1 garing ... sampai dengan P.4-153?

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Betul, Yang Mulia.

731. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Tapi dengan catatan, Bukti P.4-133 untuk C-1 TPS 177, tidak ada bukti fisiknya.

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Baik. Nanti kami susulkan, Yang Mulia.

733. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ada ... ada sekarang?

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Belum.

735. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, yang disahkan P.41 sampai dengan P.4-153, kecuali dengan catatan tadi, ya?

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AAN SUKIRMAN (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.

737. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Izin, Yang Mulia? Tadi untuk bukti kami yang dari Gerindra, perorangan belum disahkan, Yang Mulia. Yang sudah kami masukkan.

739. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Saya ulangi, Gerindra, Nomor Perkara 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, untuk perorangan tadi, ya?

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Ya, betul, Yang Mulia.

741. KETUA: ANWAR USMAN

P-1.1 sampai dengan P.35.6?

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DWI PUTRI CAHYAWATI (GERINDRA)

Betul, Yang Mulia.

743. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ini untuk Nasdem, ini bukti tambahannya ini hanya flasdisk hanya ini?

744. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Ada 2, Yang Mulia, yang flashdisk itu yang terakhir. Yang pertama, itu ada 4 rangkap, nomornya 47305. Yang satu lagi, 47605 tanda terima ... nomor tanda terima.

745. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tanda terima, ya?

746. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Ada, Yang Mulia.

747. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dicek lagi.

748. KUASA HUKUM KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.

749. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sambil menunggu dari PKB dan Nasdem. Perlu disampaikan beberapa hal. Pertama, untuk penundaan sidang beberapa perkara pada sesi ini. Ada 4, ya jadinya? Yang satu pemohon yang kabur, ya? Yang satu lagi, dicabut. Cabutnya penuh dengan keseriusan tadi, luar biasa.

Jadi penundaan sidangnya hari Selasa, tanggal 16 Juli 2011 ... 2019 pukul 13.00 WIB, dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti. Kemudian pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi, jadi tidak ada lagi surat-menyurat, ya.

Kemudian ada catatan lain bahwa perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat pada hari Jumat, 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, jadi ini untuk Pihak Terkait, Termohon, dan Bawaslu.

Kemudian yang kedua, tambahan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu diserahkan paling lambat sebelum selesai sidang hari Selasa, 16 Juli 2019.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU WIDODO (GOLKAR)

Dari Pemohon boleh sedikit, Yang Mulia?

751. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar-sebentar!

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU WIDODO (GOLKAR)

Oh, ya.

753. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Nasdem saya ulangi, ya!

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Baik, Yang Mulia.

755. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Buktinya P-1 Nasdem sampai dengan ... sampai dengan P-27 (...)

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Bet (...)

757. KETUA: ANWAR USMAN

Nasdem DKI Jakarta RI. Ya benar, ya?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Betul, Yang Mulia.

759. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk PKB (...)

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Ya, Yang Mulia?

761. KETUA: ANWAR USMAN

Bukti P-1 sampai dengan P-25.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Benar, Yang Mulia.

763. KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya?

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Benar, Yang Mulia.

765. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diverifikasi, dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29-01-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RADIAN SYAM (AHMAD IMAN PKB)

Terima kasih, Yang Mulia.

767. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, Pak Heru, silakan!

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174-04-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERU WIDODO (GOLKAR)

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum ditutup, mungkin mohon berkenan menyampaikan satu hal, berkaitan dengan pembuktian.

Jadi kalau kami diperkenankan untuk bertanya, Pemohon mendapatkan giliran untuk menghadirkan saksi dengan batasan berapa orang untuk DPR RI? Dan mungkin kira-kira waktunya apakah seminggu setelah tanggal 16 atau karena berkaitan mungkin dengan waktu untuk persiapan dari kami.

Terima kasih, Yang Mulia.

769. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini, Para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, untuk semua saja, persidangan ini sampai hari Jumat adalah mendengarkan permohonannya semua. Kemudian dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu juga sama. Setelah itu, kita akan mengadakan RPH, ya. Untuk memutus perkara-perkara yang di-dismissal. Itu akan diselenggarakan setelah kita RPH tanggal berapa ... 22 atau 23. Nah, setelah itu, baru memasuki tahap pemeriksaan pembuktian. Pembuktian dengan menghadirkan saksi. Nanti kita umumkan setelah kita melakukan ... apa namanya ... terakhir pada waktu kita melakukan Persidangan Dismissal, baru setelah itu perkara-perkara yang lanjut, baru berapa saksi yang bisa dihadirkan.

Karena begini kan, ada satu perkara, 1 nomor perkara, dia mempersoalkan DPR, pengisian DPR, pengisian DPRD Provinsi, pengisian DPR Kabupaten/Kota. Nanti itu saksinya jumlahnya bervariasi. Ya, nanti akan ditentukan, kemudian dan disampaikan. Kemudian pada waktu kita mengadakan Sidang Pleno untuk pembacaan Ketetapan atau Putusan Dismissal. Gitu, Pak Heru, ya semuanya saja. Ya, itu yang harus kita lakukan. Terima kasih.

770. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Yang Mulia, dari Pihak Terkait PPP.

Pertama, berkaitan dengan masalah Permohonan Perkara 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi untuk Dapil VI DKI dicabut kami mohon dari Pihak Pemohon untuk bisa menyerahkan kepada kami surat pencabutan melalui Yang Mulia Majelis Hakim. Itu pertama.

Yang kedua, soal menyangkut masalah Surat Permohonan Pihak Terkait berkaitan dengan penandatanganan dari Ketum dan Sekjen. Di dalam PMK itu kan di Pasal 23 ayat (2) itu kan memang di situ diatur, tetapi ini sudah diberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, maka kemudian dia bertindak dan untuk atas nama Pemohon di dalam mengambil tindakan sehubungan dengan masalah penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan perkara quo.

Demikian mon ... masukan dan pencerahan dari Majelis. Terima kasih, Yang Mulia.

772. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

773. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu nanti yang terkait dengan surat pencabutan ... sudah diserahkan surat pencabutan, tadi kan baru lisan, ya?

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Kami internal, Yang Mulia.

775. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53-14-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Kalau dari Pemohon Demokrat itu internal, bukan dengan PPP.

777. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan, ini tadi surat pencabutan perkara (...)

778. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Yang dari Nasdem, Yang Mulia.

779. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, dari Nasdem?

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDANA MARPAUNG (NASDEM)

Ya, dari Nasdem nanti menyusul, Yang Mulia, untuk pencabutan dapil.

781. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, dapil tadi. Baik. Jadi, nanti kalau sudah ada, pastikan kami serahkan, ya? Kemudian yang terkait (...)

782. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Terima kasih, Yang Mulia.

783. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, yang terkait dengan Permohonan sebagai Pihak Terkait, itu nanti menerima sesuai dalam Pasal 23 ayat (2), itu kan jelas sekali bahwa yang menandatangani adalah ketua umum dan sekretariat jendral atau nama lain yang setara dengan hal itu.

Mengenai hal kemudian menyangkut Kuasa Hukum yang selama ini diberikan oleh Pihak Terkait dari beberapa yang lengkap, seperti ketentuan PMK, ada memang yang kemudian dia menyampaikan hanya keterangan saja, tidak diikutsertakan dengan permohonan.

Nah, nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan Hakim, ya? Yang jelas kami sudah menyampaikan, bagaimana ketentuan dalam PMK-nya, gitu, ya?

784. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Terima kasih, Yang Mulia. Tapi kami kan sudah menyampaikan surat permohonan berhubungan dengan keterangan Pihak Terkait itu kan, dari tanggal Surat Kuasa yang kami terima, 2 Juli, kami masukkan ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Maka, kemudian kami mohon melalui sidang ini, jika berkenan, kami akan minta kepada ketum dan sekjen untuk bisa menandatangani itu.

Dan saya kira, mungkin Pihak Terkait yang lain juga ada yang seperti itu bahkan ada yang belum serahkan lagi. Itu kira-kira begitu, Yang Mulia.

785. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan saja, Pihak Terkait. Nanti kami pertimbangkan.

786. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JOU HASYIM WAIMAHING (PPP)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

787. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, sudah cukup jelas, ya? Ya, sebenarnya kalau apa yang disampaikan dalam persidangan ini, ya, sudah cukup sah. Seperti pencabutan itu. Tadi, tapi ya nanti akan disusul juga, ya, Pak Taufik? Baik.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Izin, Yang Mulia. Termohon, Yang Mulia ... Termohon, Yang Mulia.

789. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

790. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Kami mohon dapat ... mendapatkan kopi daftar alat bukti, Yang Mulia, dan jug ... sekaligus kami mohon perkenan untuk (...)

791. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Ya, bisa, nanti selesai sidang ini, silakan di Kepaniteraan.

792. KUASA HUKUM TERMOHON: ABSAR KARTABRATA

Ya, ya, baik. Terima kasih.

793. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah jelas semua, ya? Ya, baik.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001